

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Silaya (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Cottalismewati et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Hasanuddin et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, begitu pula dengan penelitian Ramadhani et al., (2024) menunjukkan hasil yang sama bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran memerlukan kerja sama yang efektif antara atasan dan bawahan. Ketika kerja sama yang efektif dan baik diterapkan dalam proses penyusunan anggaran, maka akan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat dan akan meningkatkan kinerja. Proses penyusunan anggaran juga membutuhkan kerja sama semua bagian dalam organisasi secara partisipatif yang akan menghasilkan kinerja yang unggul.

Penelitian Sembiring et al., (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2022) menunjukkan hasil yang sama bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil

temuan ini mengindikasikan bahwa dengan menyelaraskan sasaran anggaran secara tepat dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Hermanto (2018) menyatakan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Penelitian Pela Kiri et al., (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Sufiati et al., (2022) menyatakan hasil yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dengan baik dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Tahar & Kunchayo (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian Rosita & Asrini (2022) menyatakan hasil yang sama bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin optimal kinerja pemerintah daerah dan dapat menciptakan stabilitas serta efisiensi kinerja pemerintah daerah.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori keagenan mengkaji hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agen) dalam sebuah perusahaan. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda, sehingga akhirnya terjadi konflik kepentingan. Principal ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan, sedangkan agen mungkin memiliki tujuan pribadi yang

tidak selalu sejalan dengan tujuan principal. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan ini yaitu sebuah kontrak yang ada antara principal dan agen, atau antara dua individu, kelompok, maupun organisasi. Pihak principal merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan arah perkembangan bisnis di masa depan dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain (agen).

Teori keagenan tidak hanya berlaku dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam pemerintahan. Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di pemerintah daerah merupakan contoh klasik dari hubungan principal dan agen. Pemerintah daerah sebagai agen penyusunan anggaran dan meminta persetujuan pusat yaitu pemerintah pusat sebagai principal. Setelah anggaran disahkan dan disetujui, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran dan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah pusat. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara baik dan tepat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan (Zelmiyanti, 2016). Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan sasaran anggaran.

## **2. Kinerja Pemerintah Daerah**

Secara etimologis, kinerja berasal dari istilah prestasi kerja (performance). Menurut Mangkunegara (2005), istilah ini berasal dari kata job performance atau actual performance, yang merujuk pada kemampuan kerja nyata yang didapat oleh individu. Kinerja mencakup pencapaian kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang diperoleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Dalam PP nomor 8 tahun 2006, kinerja pemerintah diartikan sebagai kualitas output yang dihasilkan dari kegiatan dan program pemerintah sejalan dengan pembagian anggaran yang ditetapkan. Keberhasilan

kinerja pemerintah dapat diukur dari pembangunan di bidang ekonomi, politik, kemasyarakatan, serta pembangunan. Indra Bastian (2006:274) mengartikan bahwa kinerja adalah representasi dari hasil implementasi suatu aktivitas atau kebijakan dalam mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi. Masyarakat umum menilai pencapaian pembangunan dalam bidang perekonomian yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur (Zeyn & Nuraeni, 2023). Menurut Mahsun (2014, dalam Ayu, 2024) Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi:

1. Input merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilakukan agar menghasilkan output. Dana, sumber daya manusia, informasi, aturan, undang-undang, dan lainnya dapat berfungsi sebagai indikator.
2. Proses merupakan ukuran yang digunakan untuk merumuskan dan mengevaluasi bagaimana suatu kegiatan atau program dilaksanakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Indikator ini menekankan pada langkah-langkah, prosedur, dan mekanisme selama pelaksanaan suatu kebijakan atau program.
3. Output adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi hasil langsung dari sebuah program atau kegiatan. Output dapat dihubungkan dengan keberhasilan pelaksanaan program, efisiensi anggaran, dan pengelolaan keuangan. Indikator ini juga digunakan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan jika dikaitkan dengan sasaran yang jelas dan terukur.
4. Hasil merupakan segala sesuatu yang menunjukkan beroperasinya kegiatan dalam jangka menengah (*direct effect*).

5. Benefit merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan akhir kegiatan. Indikator ini mencerminkan keuntungan yang didapat dari indikator hasil. Keuntungan tersebut akan terlihat setelah beberapa waktu berlalu, terutama dalam jangka menengah dan panjang.
6. Dampak adalah pengaruh yang didapatkan, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan.

### **3. Partisipasi Anggaran**

Partisipasi anggaran merupakan pendekatan bottom-up dalam proses penyusunan anggaran, di mana aliran informasi anggaran dimulai dari tingkat tanggung jawab yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam partisipasi anggaran memerlukan keterlibatan komunikatif dan peran aktif dari atasan dan bawahan dalam proses penyusunannya. Garrison dan Noreen (2000) menyatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan kerja sama penuh yang melibatkan dari manajer di semua level dalam pembuatan anggaran. Sedangkan menurut Brownell (1982) menjelaskan bahwa partisipasi dalam penganggaran merupakan proses di mana individu yang dinilai kinerjanya dan mendapatkan penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, mempengaruhi dan terlibat dalam penetapan target anggaran tersebut. Indikator partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Soobaroyen (2005, dikutip dalam Farid, 2022) sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam proses penyusunan anggaran.
2. Memberikan kontribusi.
3. Menetapkan anggaran sesuai kebutuhan dan dapat memberikan pertanggungjawaban.
4. Jika ada penyimpangan anggaran, lakukan revisi yang diperlukan.

#### **4. Kejelasan Sasaran Anggaran**

Dalam proses penyusunan anggaran, kejelasan anggaran di tingkat pemerintah daerah berdampak pada aparat dalam merencanakan dan merumuskan anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini memungkinkan setiap aparatur untuk memiliki waktu dan informasi yang cukup dalam memperkirakan anggaran yang perlu ditetapkan di masa yang akan datang. Menurut (Kenis, 1979) dalam Wanudya (2019:66) kejelasan sasaran anggaran mengacu pada tingkat kejelasan dan spesifikasi tujuan anggaran, sehingga orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut dapat memahaminya dengan baik. Menurut Simanjuntak (2005, dikutip dalam Farid, 2022) indikator untuk menilai kejelasan sasaran anggaran meliputi:

1. Jelas, yaitu sasaran anggaran harus disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan ambiguitas.
2. Spesifik, artinya anggaran perlu dijelaskan secara rinci.
3. Dapat dipahami, yaitu anggaran yang realistis yang dapat diwujudkan atau dicapai.

#### **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah proses perkembangan dari tindakan yang dilakukan oleh seorang petugas, baik ketika masih dalam lingkup otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya (Ledvina V. Carino, 2002). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penerapan manajemen kinerja dalam sektor publik yang mendukung pelaksanaan reformasi dalam sistem birokrasi, berfokus dalam pencapaian hasil (outcome) dan usaha untuk mendapatkan output yang berkualitas. Dengan demikian, sistem ini

mengimplementasikan manajemen kinerja sebagai upaya untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan (Mardiana & Setiyowati, 2021). Adapun indikatornya menurut Mardiasmo (2009, dikutip dalam Qodariah, 2017) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

#### **6. Komitmen Organisasi**

Menurut Robbins, (2008) komitmen organisasi dapat diartikan sebagai tingkat di mana seorang karyawan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. Individu cenderung memberikan upaya maksimal untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Apabila setiap karyawan memiliki komitmen yang tinggi dan kuat dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat, maka kinerja sektor publik akan meningkat secara otomatis, Namun sebaliknya, jika karyawan kurang memiliki komitmen, mereka lebih rentan untuk melakukan Tindakan curang demi mencapai tujuan pribadi. Indikator komitmen organisasi menurut Heidjrachman dan Husnan (2016) sebagai berikut:

1. Kedisiplinan, yaitu seberapa patuh karyawan pada aturan yang telah ditetapkan.
2. Kehadiran, yaitu tingkat ketidakhadiran karyawan, baik karena sakit, cuti, atau alasan lainnya.
3. Kerjasama, yaitu keberhasilan karyawan bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama.

4. Kepuasan kerja, yaitu tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan kondisi kerja.

### **C. Perumusan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Anggaran merupakan pernyataan resmi yang disusun oleh manajemen mengenai program-program yang akan dilaksanakan di masa depan dalam suatu periode tertentu (Hanson dan Mowen, 2001). Dengan adanya partisipasi anggaran dalam proses penyusunan, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, sehingga proses anggaran menjadi lebih transparan dan pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan realistis. Berdasarkan teori agensi, partisipasi anggaran dapat dikaitkan hubungan antara principal dan agen dalam proses penyusunan anggaran. Dengan partisipasi anggaran yang tinggi memberikan kesempatan bagi agen untuk menyampaikan informasi yang relevan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiwati & Ariany (2023), menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses penyusunan anggaran dalam organisasi melibatkan anggota organisasi. Keterlibatan ini sangat penting dalam pengelolaan pemerintah daerah, karena dapat memperkuat rasa solidaritas di antara para kepala dinas dan badan beserta pihak-pihak lain yang terlibat.

Penelitian Cottalismewati et al., (2022), menyatakan hasil yang sama yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar individu terlibat dalam proses

penyusunan anggaran, maka semakin besar rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap hasilnya. Keterlibatan aktif dalam penyusunan anggaran memfasilitasi terwujudnya komunikasi yang lebih efektif antar anggota tim dan memperkuat kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran berpotensi meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

## **2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas melalui anggaran yang disusun. Sasaran anggaran yang jelas dapat membantu setiap pihak di dalam organisasi untuk mengetahui prioritas alokasi dana, target yang ingin dicapai, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi untuk mencapai tujuan dan target yang sebelumnya telah ditetapkan (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Oroh et al., (2023), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Semakin terperinci dan jelas sasaran anggaran, maka semakin mudah dalam merancang dan melaksanakan anggaran dengan lebih efisien dan dapat meningkatkan efektivitas serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al., (2020), menyatakan hasil

yang sama dengan penelitian Oroh et al., (2023), yang di mana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan tujuan anggaran yang relevan dapat mendukung kelancaran proses kerja dan mendorong peningkatan kinerja aparat pemerintah dalam menyusun anggaran guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

### **3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas adalah suatu tanggung jawab seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan jujur, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kinerja pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas, hal ini karena pemerintah daerah mengelola sumber daya publik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Akuntabilitas memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pela Kiri et al., (2021), menyatakan hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.. Akuntabilitas yang baik terjadi karena adanya organisasi pemerintah yang melaksanakan prosedur-prosedur yang ditetapkan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kinerja organisasi yang baik untuk menciptakan kinerja pemerintah selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian Safitri et al., (2022), menyatakan hasil yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi dan

kualitas kinerja pemerintah. Penerapan akuntabilitas dalam pemerintah akan mampu mengelola anggaran lebih optimal, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

#### **4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Komitmen organisasi merupakan rasa loyalitas dan dedikasi seseorang terhadap organisasi, yang mencerminkan seberapa besar individu tersebut terlibat dan memberikan kontribusi untuk keberhasilan organisasi. Menurut Luthans (2006), menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan dorongan yang kuat dalam diri individu untuk tetap berada dalam organisasi, berupaya maksimal sesuai dengan harapan organisasi, serta memiliki kepercayaan dan kesediaan untuk menerima nilai-nilai dan tujuan yang ada dalam organisasi.

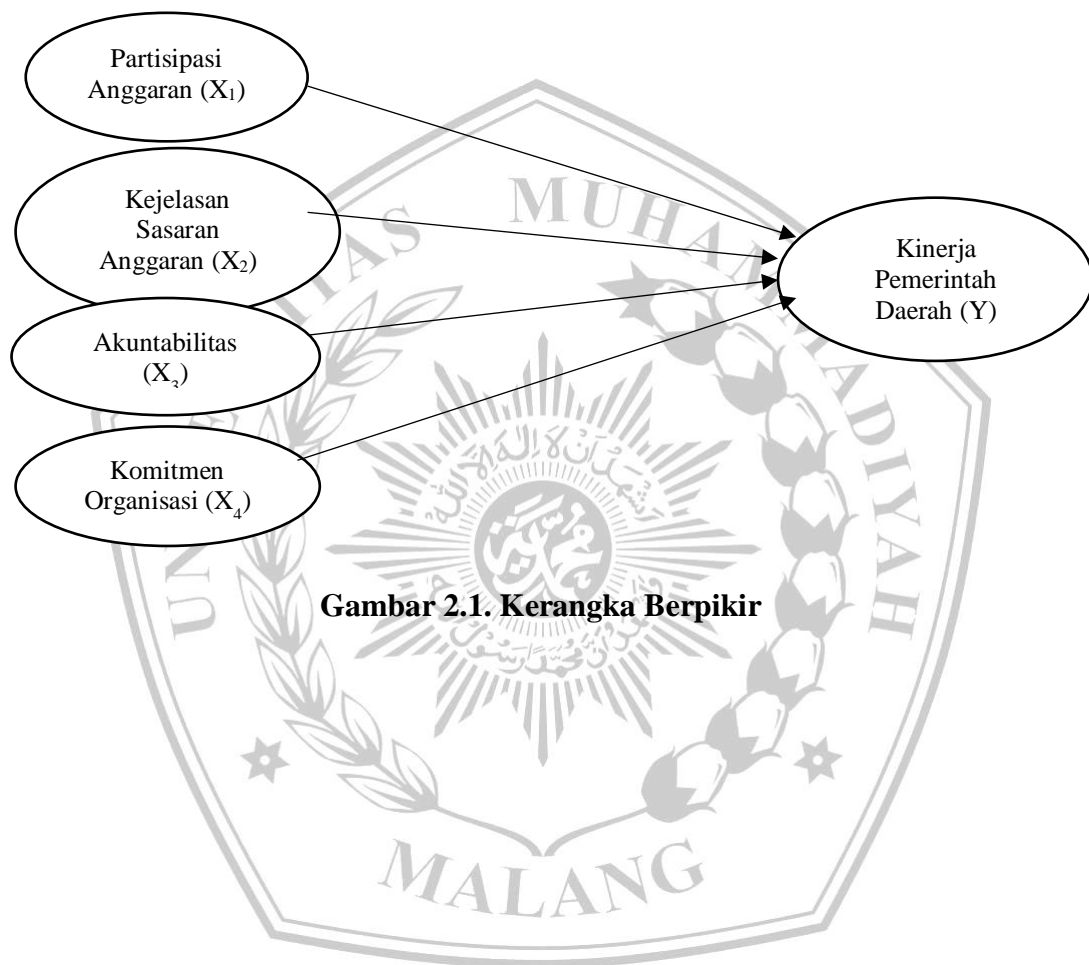
Penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Kuncahyo (2020), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi pemerintahan, maka kinerja yang dihasilkan akan meningkat.

Penelitian Mutia et al., (2023), menyatakan hasil yang sama bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja. Komitmen organisasi yang kuat juga dapat mendukung keterlibatan dan kesejahteraan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut adalah kerangka penelitian yang dapat dijelaskan:



**Gambar 2.1. Kerangka Berpikir**